

# DAYA TAHAN PARTAI GOLKAR PROVINSI BALI (STUDI KEPENGURUSAN GANDA TAHUN 2014-2015)

Ni Putu Ayu Indrawati<sup>1)</sup>, Muhammad Ali Azhar<sup>2)</sup>, Bandiyah<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [ayuindrawati588@gmail.com](mailto:ayuindrawati588@gmail.com), [aliazhar23mr@yahoo.co.id](mailto:aliazhar23mr@yahoo.co.id), [dyah\\_3981@yahoo.co.id](mailto:dyah_3981@yahoo.co.id)

## ABSTRACT

*The success of Golkar in overcoming multiple management conflicts in 2014-2015 had an impact on the management of the Bali Province. This makes Golkar seen as a strong political party in the institutional system, infrastructure, and internal party mechanisms. This strength is the main attraction of the writer to analyze it with the theory of Talcott Parson Functionalism with the concept of the scheme A-G-I-L (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency). This study uses a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that Golkar's success in defending itself from the shocks of party internal conflicts stemmed from the Party's strength. According to the theory used the results of the study show that first, the adaptation scheme, used by Golkar as a form of the main force in maintaining existential and determining the direction of the Golkar party in the new political era. Second, the goal attainment scheme shows that Golkar's strength is based on an ideological foundation, intellectual strength, and work-oriented orientation. But on the other hand, the strong leadership in the Golkar party plays a very important role as a driver of cadre consolidation in maintaining the existence of the party in the community. Third, Golkar in maintaining party resistance also prioritizes the consistency of cadres in framing a good party platform as its Integrity. And fourth, Golkar in identifying itself as an open, moderate and democratic party, so in the framework of safeguarding this, the Golkar Party continues to maintain the Pancasila ideology as the latency that underlies each of its actions and maintains its old brand, which is Golkar.*

**Keyword:** Golkar, Scheme (A-G-I-L) Golkar Party and Double Management.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indeks demokrasi Indonesia turun dalam dua tahun terakhir. Penurunan kinerja partai politik menjadi salah satu variabel yang berkontribusi pada memburuknya indeks demokrasi.

Feodalisasi dan sakralisasi pemimpin parpol dinilai menjadi salah satu penyebab kegagalan partai politik menjadi lembaga demokrasi. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 1 partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik juga berfungsi sebagai solusi kepentingan bersama. Menurut Ramlan Subakti (1992:117-121) dalam buku Political karya Muliansyah, ada tujuh fungsi partai politik: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik,

pengendali konflik, dan kontrol politik. Jika suatu partai politik dapat menjalankan fungsinya maka demokrasi di Indonesia akan berjalan lancar. Namun seperti yang kita ketahui, kebanyakan partai politik di Indonesia tidak dapat menjalankan fungsinya karena konflik internal di dalam tubuh partai tersebut yang menimbulkan perpecahan sehingga banyak muncul partai-partai baru.

Sebagai sarana pengendali konflik, mestinya konflik yang ada di tubuh partai tidak terjadi, sebab partai politik merupakan salah satu lembaga demokrasi yang berfungsi untuk mengendalikan konflik yang mana dapat melalui cara berdialog dengan pihak pendukung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk dapat menyelesaikan dengan keputusan politik.

Sebagai partai politik, Partai Golkar juga tidak dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan internal partai. Dalam faktanya dengan adanya konflik kepentingan di internal partai Golkar tidak terlepas sampai saat namun Partai Golkar tetap menjaga istem kelmbagaan partainya dengan baik. Sehingga menjadi bahan perbincangan menarik yang akan penulis kaji.

Terjadi dualisme Munas yang menghasilkan dua kepemimpinan, antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono pada tahun 2014 terjadi karena konflik kepentingan elit partai

yang sangat mengguncang tubuh Golkar hingga ada perpecahan hingga ke DPP daerah. Hasil survey periodik Kompas mencatat rata-rata elektabilitas Golkar dalam survey ada di bawah 10 persen. Beruntung Golkar menghakhiri kondisi ini dengan Munaslub Bali yang kemudian menghasilkan Setya Novanto sebagai ketua umum.

Konflik kepentingan di dalam tubuh partai Golkar juga menimbulkan resistensi yang massif dari masyarakat. Resistensi yang dimaksud merupakan suatu gejala yang muncul dari antagonisme sosial dan politik dalam masyarakat.

Munculnya resistensi masyarakat terhadap Partai Golkar dapat dipahami oleh sepak terjangnya sebagai kendaraan politik di masa ini. Masyarakat yang sekian lama hidup dalam suasana serba seragam tiba-tiba memiliki kesempatan untuk bebas dan mengekspresikan kebebasannya. Hal ini mengakibatkan elektabilitas Partai Golkar cenderung turun, di dukung dengan dinamika di internal partai Golkar yang semakin hari semakin bertambah. Dinamika elektabilitas partai tidak terlepas dari langkah-langkah politiknya yang cenderung mempengaruhi persepsi publik.

Guncangan politik di Partai Golkar bukanlah hal baru. Mulai dari tuntutan pembubaran, kasus hukum yang menjerat ketua umumnya, hingga konflik internal sudah menjadi catatan perjalanan panjang partai ini. Kasus-kasus serupa juga sering kali terjadi, tetapi semua perbedaan

tersebut ditanggapi sebagai cara pendewasaan partai. Hal ini juga tidak terlepas dari bagaimana partai Golkar mempertahankan eksistensinya dari ancaman *genocide* politik yang dilakukan masyarakat, terutama oleh musuh politik yang menaruh dendam terhadapnya. Banyak asumsi yang dikembangkan masyarakat berkaitan dengan keberhasilan partai Golkar mempertahankan dirinya dalam konstelasi politik nasional. Tetapi, asumsi umumnya adalah bahwa dukungan fundamental yang membuat partai Golkar mampu mempertahankan diri. Kemampuan Golkar bertahan dari guncangan-guncangan politik di atas, tidak lepas dari sejarah panjang kelembagaan dari partai ini. Golkar dipandang sebagai partai politik yang kuat dari sistem kelembagaan, infrastruktur, dan mekanisme internal partai.

Dinamika di dalam tubuh Golkar juga sangat berpengaruh pada kelembagaan dan elektabilitas Golkar di wilayah Provinsi Bali.

Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki partisipasi politik yang banyak dari masyarakat. Oleh sebab itu perkembangan Partai Golkar di Provinsi Bali cukup pesat. Hal ini didukung dengan adanya perpecahan kelembagaan di dalam kepengurusan partai Golkar saat adanya dua kepemimpinan berbeda di tingkat pusat. Perpecahan kepengurusan Golkar di Bali yakni Kubu Sumarjaya Linggih dan Sudikerta, menimbulkan terpecahnya kelembagaan partai Golkar di Bali saat pemilihan Presiden 2014.

Namun dua kepemimpinan ini tidak berlangsung lama. Adanya kepentingan-kepentingan di dalam tubuh Golkar yang dapat berdampak Konflik internal, mulai terlihat kembali saat Pemilihan ketua Umum Golkar yang diselenggarakan di Bali pada 14 Mei 2016. Pemilihan ketua Umum Golkar yang secara aklamasi menimbulkan persepsi dari masing-masing kader yang berbeda. Sehingga pemilihan Kader yang diusung untuk Pileg 2014 dan Pilkada tahun 2015 di Bali pun juga banyak menimbulkan konflik internal di dalam Partai Golkar di Bali. Ini terlihat dari kader Partai Golkar yang "dipaksa" *head to head* dalam Pilkada Bali. Pilkada Badung tahun 2015, adanya pertarungan dua kader Golkar terbaik yaitu, Ketut Suiasa dan Made Sudiana. Hal ini sejatinya terjadi agar kader tetap dirangkul demi kepentingan bersama Partai Golkar di Badung.

Namun dengan bertarungnya kedua kader tersebut, membuat kondisi partai berlambang pohon beringin tersebut semakin pecah. Padahal, seharusnya saat-saat menjelang pilkada, setiap kader diajak untuk tetap mengingat jati diri partai yang besar di era orde baru tersebut. Namun dari berbagai dinamika yang terjadi, Partai Golkar tetap dapat berhasil dalam menduduki partai tiga besar di Bali sampai saat ini. Keberhasilan Golkar menghadapi guncangan politik dan konflik internal yang terjadi di dalam tubuh Golkar membuktikan bahwa partai ini sudah melewati seleksi alam politik yang meyakinkan partai Golkar akan tetap bertahan sebagai partai politik besar pada Pemilu 2019.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,

penulis merumuskan suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut: Bagaimana Daya Tahan (skema A-G-I-L (*Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latency*)) Partai Golkar Provinsi Bali dari kepengurusan ganda Tahun 2014-2015 ?

## Tujuan Penelitian

Mengetahui Daya Tahan skema A-G-I-L (*Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latency*) Talcot Parson Partai Golkar Provinsi Bali dari kepengurusan ganda Tahun 2014-2015.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori Fungsionalisme Struktural yang dibangun Talcott Parsons (2009:102) dalam buku karya Umar Ibnu Alkhatab dengan judul *Beringin ke Beringin* dan dipengaruhi oleh para Sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris, positivistis dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana

(alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

### Skema AGIL Talcott Parsons

Talcott Parsons telah banyak menghasilkan sebuah karya teoritis. Ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhirnya. Pada bagian ini membahas karya akhirnya yaitu Teori Fungsionalisme Struktural.

Talcott Parsons dalam buku karya Umar Ibnu Alkhatab dengan judul *Beringin ke beringin* (2009)

terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem "tindakan" yaitu skema AGIL.

Fungsi AGIL adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi).

Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem – adaptasi (*adaptation*), (*Goal attainment/ pencapaian tujuan*), (*integrasi*) dan (*Latency*) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut di sebut dengan skema AGIL.

Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut:

1. *Adaptation* (Adaptasi), sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan), sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi), sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,I, L).
4. *Latency* (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya. Dalam pembahasan ini tentang keempat sistem tindakan maka akan menjabarkan cara parsons menggunakan AGIL.

### **Pelebagaan Sistem Kepartaiaan**

Konsep pelembagaan sistem kepartaian diperkenalkan Mainwaring (1999:22) dimana ia menegaskan bahwa demokrasi yang kuat adalah pada saat kondisi sistem kepartaian yang berlangsung telah terinstitusionalisasi. Empat hal penting yang terlihat dalam kelembagaan partai (Pamungkas, 2011:69). Pertama, stabilitas kompetisi

antar partai. Sistem yang terlembagakan membutuhkan jaminan stabilitas yang termanifestasikan pada pola kompetisi antar partai. Kedua, pengakaran partai di akar rumput. Pelebagaan sistem kepartaian yang memiliki akar kuat pada masyarakat dan mayoritas pemberi suara akan berpengaruh pada karakter peran masing-masing partai politik yang ada di masyarakat. Ketiga, legitimasi partai politik dan pemilu dalam penentuan hak untuk memerintah. Keempat, hadirnya partai sebagai sebuah organisasi. Sebagai struktur yang menyediakan sistem, partai politik harus mengembangkan soliditas sebagai organisasi.

## **4. HASIL DAN ANALISIS**

### **Sejarah Partai Golkar Nasional dan Lokal di Provinsi Bali**

Partai Golongan Karya ( Golkar) merupakan salah satu partai yang paling lama berkiprah di panggung politik Indonesia. Dengan segala dinamikanya, partai berlambang pohon beringin yang berdiri pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno ini, masih bertahan hingga kini. Sejarah Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada akhir pemerintahan Soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi (pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, serta nelayan.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan

kekaryaannya kedalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI).

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 suara Partai Golkar kembali turun keposisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Riau, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla.

Pada akhir 2014 sampai awal tahun 2015 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan Agung Laksono hasil Munas Ancol, Jakarta. Setelah mengalami dinamika lebih dari setahun, dualisme tersebut kemudian berakhir dengan keluarnya SK Menkumham yang “menghidupkan”

kembali kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau yang diselenggarakan pada 2009 lalu.

Pemberlakuan kembali kepengurusan Riau ditegaskan dalam Surat Keputusan Menkumham dengan Nomor M.HH-02.AH.11.01/2016, yang menyatakan mengesahkan surat Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01/2012, tentang Komposisi DPP Partai Golkar.

Kepengurusan yang dihidupkan selama enam bulan itu punya wewenang untuk menetapkan panitia Munaslub, sesuai AD/ART partai yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Sehingga munculnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Selasa, 17 Mei yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar terpilih, yakni Setya Novanto. Namun dengan adanya kasus maka ketua umum Partai Golkar Dilengserkan dan mengadakan Munas kembali Pada Rabu, 13 Desember 2017, Partai Golkar melaksanakan rapat pleno yang menyatakan kekosongan kepemimpinan dan memutuskan Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Kemampuan Partai Golkar dalam mempertahankan dirinya menjadikan sebuah Partai Besar sampai saat ini merupakan hal yang sangat menarik. Hal ini juga berdampak pada keberadaan DPP Partai Golkar di berbagai tingkat wilayah.

## **HASIL TEMUAN DAN ANALISIS**

### ***Adaptasi* Sebagai Daya Tahan Golkar Provinsi Bali dari Kepengurusan Ganda Tahun 2014-2015**

Adaptasi atau *positioning* dapat di cermati melalui tindakan Partai Golkar untuk segera melakukan transmudasi menjadi partai politik yang kemudian diikuti dengan perubahan dan pembaharuan struktur untuk menjamin terciptanya suatu lingkungan politik yang lebih kredibel. Dalam Skema A-G-I-L Talcot Parson menjelaskan bahwa transmudasi dan pembaharuan struktur ini merupakan cara adaptasi yang paling rasional untuk menjaga keberlangsungan hidup dan berkembangnya Partai Golkar.

Adapun pola adaptasi politik Partai Golkar yang diterapkan dalam setiap penyelesaian konflik dalam internal partai yakni *pertama* , merangkul semua kelompok dan meletakkan semua kelompok itu dalam suatu struktur yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan kekuatan, pola adaptasi ini dikembangkan terutama terhadap mereka yang bersebrangan secara politik dengan *mainstream* politik yang ada di tubuh Partai Golkar, yaitu faksi yang menguasai struktur atas kepemimpinan Partai Golkar. Dengan pola ini tentunya diharapkan tidak terjadi korosi moral akibat tidak berjalannya pembagian kekuasaan secara merata. Dengan demikian, proses berpolitik semacam ini, yakin agregasi kepentingan dan distribusi kekuasaan, dua hal yang menjadi fungsi partai politik, dapat menjaga dan menjamin

kelangsungan bukan hanya struktur, tetapi juga eksistensi partai.

Dengan demikian, pola adaptasi ini dianggap sebagai mekanisme internal partai yang dapat menyatukan berbagai bentuk perbedaan dan meletakkannya dalam kerangka yang fundamental sebagai penguat soliditas internal. Kekuatan-kekuatan oposisi yang ada dibebaskan menyampaikan pendapat tanpa harus diabaikan, bahkan digunakan sebagai media penyeimbang sepanjang perbedaan pendapat itu dapat di kelola dan tidak keluar dari koridor yang telah di tentukan. Kritik dan manuver dipelihara untuk menjaga langkah-langkah politik partai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola adaptasi ini dilakukan oleh struktur atas Partai Golkar adalah demi menjamin kelangsungan partai tanpa melahirkan perpecahan dalam partai.

### ***Goal Attainment* sebagai bentuk Elemen Daya Tahan Golkar Provinsi Bali dari Kepengurusan Ganda Tahun 2014-2015**

*Goal Attainment*, Talcot Parson mengindikasikan bahwa setiap tindakan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan utama adaptasi Partai Golkar dalam mengikuti pembaharuan politik yang ada, dan dalam konteks yang lebih luas adalah mengikuti proses politik, yaitu pemilu, sebab dengan proses tersebut Partai Golkar dapat mempertahankan eksistensi dirinya. Disamping tujuan untuk mengikuti pemilu, sangat jelas terlihat bahwa Partai Golkar

juga bertujuan untuk menyusun kekuasaan yang bersumber dari rakyat

Berpandangan pada kepengurusan ganda yang pernah terjadi dalam tubuh Partai Golkar, dengan adanya *strong leadership* sebagai penggerak konsolidasi maka kepengurusan Ganda Tersebut tidak berlangsung lama dan dapat di ingatkan dengan adanya elemen *Goal Attainment* yang di bentuk oleh Partai Golkar.

Keyakinan dalam perjuangan politik Partai Golkar di dasari oleh landasan ideologis yang kuat sejak kelahirannya. Sebagaimana dielaborasi dengan kekuatan ideologis dan lantas ditopang pula dengan tradisi intelektualitas dan orientasi prestasi (karya kekarya), maka itulah yang menyebabkan kader-kader Partai Golkar merasa mantap dan yakin dalam berjuang, dan inilah yang menjadikan mereka bersikap militan untuk mencapai *Goal Attainment*. Dalam perjuangan Partai Golkar, dengan kematangan ideologis, seorang kader akan berjuang dengan penuh totalitas dalam mewujudkan cita-cita partai dan bangsa. Konsolidasi Ideologi pada hakikatnya merupakan penguatan ideologis, berupa internalisasi nilai-nilai ideologi Partai Golkar yang identik dengan ideologi negara dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan ditengah-tengah realitas kehidupan segenap komponen bangsa, termasuk dalam hal ini kader-kader Partai Golkar. Konsolidasi Ideologis Partai Golkar berarti membangun dan memperkuat kesadaran nilai, norma dan tindakan etnis dan politis setiap kader partai Golkar dalam bingkai nilai-nilai ideologis Pancasila.

### ***Integrasi Sebagai Bentuk Upaya Memelihara Daya Tahan Partai Golkar dari Kepengurusan Ganda Tahun 2014-2015***

*Integrasi*, dapat di temukan dalam mekanisme politik konsesus partisipatif dimana semua sumberdaya digerakan untuk memelihara hubungan satu sama lain meski dalam bingkai yang membolehkan perbedaan pendapat dan menjaga partai dari ancaman perpecahan, baik yang diakibatkan oleh pihak luar maupun oleh pihak dalam partai sendiri dengan mengacu pada *platform* partai (paradigma baru). Disamping integrasi internal, juga terjadi integrasi dengan sektor eksternal dengan mengidentifikasi dirinya sebagai partai yang terbuka, moderat, demokratis, dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Dalam hal ini di perlukan sinergisitas yang efektif dari segenap *stakeholders* (pengampu kepentingan) Partai Golkar, sehingga energi kolektif Partai Golkar dapat tercipta dengan cepat, tepat, dan kuat, untuk memastikan tercapainya tujuan partai. Selain itu, dalam konteks integrasi dibutuhkan suatu konsistensi dalam penegakan disiplin partai dan penerapan prinsip *reward and punishment*. Implementasi prinsip seperti itu juga sangat penting dan mendasar, karena dengan demikian kultur organisasi akan terbentuknya, dan yang membentuk adalah disiplin para kader partai.

Kemudian adanya tingkat atau derajat partisipatif politik yang tinggi di internal partai, yang ditandai oleh tingginya



keterlibatan kader dan simpati Partai Golkar dalam melakukan beragam aktivitas ataupun kegiatan yang bermanfaat tidak saja bagi partai, tetapi juga terutama bagi masyarakat luas. Keikutsertaan seseorang dalam partai politik, bagaimanapun mencerminkan konteks implementasi partisipasi politik warga negara. Ini membedakan dengan mereka yang sekedar partisipasi politik diwujudkan dalam bentuk kegiatan politik yang terbatas, seperti ikut dalam pemilu.

### **Latency Sebagai Bentuk Menjaga Daya Tahan Golkar dari Kepengurusan Ganda Tahun 2014-2015**

*Latent Pattern Maintenance* merupakan buah pemikiran Talcot Parson yang berpandangan bahwa untuk menjaga adaptasi, tujuan, dan integrasi yang telah di bangun, maka laten Golkar tetap menjaga ideologi Pancasila yang mendasari setiap tindakannya dan tetap memelihara brand lamanya, yaitu, Golkar. Setidak-tidaknya ada dua hal yang patut dicermati dari kasus ini, yaitu ideologi dan identitas (Pancasila dan Golkar). Kedua hal itulah yang menjadi daya rekat yang mampu mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan mempermudah publik untuk mengingatnya. Tidak bisa dibayangkan jika Partai Golkar menggunakan ideologi dan identitas selain Pancasila dan Golkar.

Adanya kepengurusan ganda yang menjadi kisruh perpolitikan Partai Golkar pada menjelang Pilpres 2014 dan berakhir pada akhir 2015, selain kekuatan adaptasi,

tujuan, dan integrasi dari Partai Golkar sendiri maka dengan menggunakan ideologi dan identitas yakni Pancasila dan Golkar, kader sadar akan suatu kebersamaan yang telah di bangun dalam sebuah Organisasi Partai Politik Golkar. Hal ini pun yang membuat meredam kembali konflik internal yang terjadi dalam tubuh Golkar yang membentuk kepengurusan ganda sehingga munculnya Munas tahun 2016 yang membentuk 1 kepengurusan Partai. Hal ini pun juga berpengaruh dalam kepengurusan di tingkat daerah khususnya DPP Provinsi Bali.

Gerakan Partai Golkar ini merupakan cara kolektif untuk mengangkat dan membangkitkan kembali hakikat Partai Golkar sebagai: (1)gerakan ideologis; (2) gerakan pembaruan; (3)gerakan karya kekarya; (4)gerakan pembangunan; (5) gerakan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Hal-hal tersebut sesungguhnya merupakan kekuatan magnetis yang secara alamiah telah melekat pada Partai Golkar. Agar kekuatan magnetis tersebut memiliki daya tarik yang terus meningkat secara signifikan, sehingga Partai Golkar bangkit dan jaya kembali, maka diperlukan kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) dan sekaligus kelembagaan yang kuat dan solid.

Partai Golkar harus selalu dibangun dan dikembangkan dalam paradigma organisasi politik yang modern dan demokratis. Ini selaras dengan kekuatan magnetik Partai Golkar yang selalu menekankan prinsip pembaruan dan pembangunan. Kelembagaan Partai Golkar

harus kuat, sehingga dengan demikian, kinerja organisasi akan semakin optimal. Sejalan dengan itu, Partai Golkar harus selalu dekat dengan rakyat, semakin aktif dan proaktif berada di tengah-tengah rakyat, mendengar aspirasi dan kepentingan rakyat; sehingga sebagai kekuatan baru, Partai Golkar benar-benar memiliki basis dukungan yang kuat di tingkat "grass root". Hal ini penting, sejalan dengan perlunya penguatan legitimasi sosial bagi Partai Golkar, sebagai aksentuasi dari motto Partai Golkar, "Suara Golkar, Suara Rakyat", dan di sisi lain tetap memantapkan Partai Golkar sebagai "The Party of Ideas", sumber inspirasi dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Hal-hal tersebutlah yang membedakan Partai Golkar dengan partai-partai politik lainnya.

## 5. KESIMPULAN

Kekuatan faktual dalam tubuh Partai Golkar diperhitungkan sebagai kontributor bagi penguatan struktur partai yakni, pola Adaptasi yang di lakukan partai Golkar. Partai Golkar melakukan adaptasi terhadap situasi politik yang baru mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga pola adaptasi merupakan pembangunan Golkar yang utama dalam memberikan toleransi pada perbedaan pendapat, sehingga berpengaruh besar pada Keberhasilan Golkar. Partai Golkar dalam mempertahankan eksistensi dirinya maka, landasan ideologis, tradisi intelektualitas dan orientasi prestasi (karya kekaryaan), menjadi modal utama *Goal attainment* Partai Golkar. Kekuatan Partai Golkar Terletak pada sistem atau kelembagaan partai, sehingga daya tahan Partai Golkar

sampai saat ini tetap kuat karena didukung oleh tindakan kepemimpinan yang kuat. partai Golkar dalam upaya memelihara daya tahan partai, maka Golkar menegakan suatu konsistensi dalam penegakan disiplin kader dalam bentuk Integrasi Golkar. Sehingga integrasi dalam bentuk partisipasi yang tinggi di tingkat internal partai dapat meningkatkan eksistensi partai Golkar dikalangan masyarakat. Disamping itu untuk menjaga adaptasi, tujuan dan integrasi yang telah dibangun maka Golkar tetap menjaga ideologi pancasila yang mendasari setiap tindakannya.

## 6. DAFTRAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Budiarjo, Miriam. (2008) *Dasar-Dasari ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Darwoko, Dwi, Suryanto. Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar Terapan*. Jakarta: Predana Media
- Gatara, Sahid. 2009. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Media
- Ibnu Alkhatib, Umar. (2009). *Dari Beringin Ke Beringin (Sejarah, Kemelut, Resistensi, dan Daya Tahan Partai Golkar)*. Yogyakarta: Ombak.
- Nurhasim Moch., dkk. (2005). *Konflik Antarelit Politik Pokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritze, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Susan, Novri, M.A. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia no.2  
tahun 2011 tentang Partai  
Politik. Bandung: Citra Umbara

Desember 2017 pukul 09.00s/d  
15.00)

<https://golkarbali.or.id/> (di akses pada 1  
November 2017 sampai dengan 15  
Desember 2017 pukul 09.00 s/d  
16.00)

### **Jurnal, Skripsi dan Tesis:**

Asmadianto. 2015. *Konflik Internal dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat. Studi Kasus: Konflik Internal dan Keterpilihan Kader dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014*. Yogyakarta: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah

Defneita Tantu. 2013. *Konflik internal gereja (Studi Kasus Terhadap Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Internal Antara Anggota GMIST dan KGPM "Dalam Perspektif Teori Konflik")*. Universitas Kristen.

Ilimi Tella, Rahmat. 2016, *Respon Elit Partai Golkar Makassar terhadap Dualisme Kepemimpinan DPP Pusat*. Makassar.

Radiatul Adawiah, Nurul. 2013. *Konflik Internal Partai NasDem*. Universitas Hasanuddin

Rahmat Hidayat, Andi. 2013. *Institusionalisasi Partai Politik*. Universitas Hassanudin. Makassar.

Ridha T.R. Muhammad. 2006. *Dilema Pelembagaan Partai Golkar di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Vol 2 No 1, April 2016

### **Koran:**

Dicky. 2017. *Kinerja Parpol Memburuk*. Kompas, 15 September 2017

### **Wibesite:**

<https://partaigolkar.or.id> (di akses pada 1  
November 2017 sampai dengan 15